



TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA : ANALISIS DESKRIPTIF TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR DAN POLA PERTUMBUHAN

Indah Lestari

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Ramadhaniati Innayatullail

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Abdullah Abbas

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Vito Mohandani Mohiram

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Ziko Al Fajri

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

email : uibbc.cirebon@gmail.com

Abstract. *Indonesia's economic transformation has shifted from the dominance of the primary sector (agriculture) to the tertiary (digital services) and secondary (industry) sectors, marked by a decline in agriculture's contribution from 45% of GDP (1970) to 13% (2024), as well as a surge in the service workforce from 29.7% (2020) to 49.2%. This process is driven by Engels' Law, urbanization, technology investment, and downstreaming, but is hampered by fluctuating mineral regulations, logistics costs that are 1.8 times more expensive than Malaysia, and the loss of 1.2 million formal jobs to Vietnam/Thailand. Globalization has opened up the service market (42% FDI to data centers & health-tech), creating 4 million micro-workers (ojol, couriers, creators) with an average income of IDR 3.5 million/month, which is 35% below the Jakarta minimum wage, but 30% of whom are female heads of rural households who are now independent. The Gojek-Shopee platform contributes 5% of household consumption via 10.9 billion transactions (2024), while also giving rise to the risk of structural unemployment, data leaks, and a service balance deficit. This descriptive-qualitative study analyzes data from BPS, World Bank, and ADB to formulate five strategic pillars for 2030: (1) equitable 5G broadband, (2) 1 million STEM talents via Digital Talent Scholarship, (3) a secure blockchain & Sovereign Cloud-based ecosystem, (4) an AI-semiconductor innovation center, and (5) adaptive regulations (Omnibus Law, PDP Law, National SPBE). This penta-helix synergy is expected to make Indonesia not just a "digital colony," but an engine of inclusive growth that creates 15 million high-quality jobs and adds 2.5% to annual GDP by 2030.*

Keywords: *Structural Transformation, Digital Economy, Micro Workers, Data Sovereignty, Inclusion 2030*

Abstrak. Transformasi ekonomi Indonesia telah bergeser dari dominasi sektor primer (pertanian) menuju sektor tersier (jasa digital) dan sekunder (industri), ditandai turunnya kontribusi pertanian dari 45% PDB (1970) menjadi 13% (2024), serta lonjakan tenaga kerja jasa dari 29,7% (2020) menjadi 49,2%. Proses ini didorong Hukum Engels, urbanisasi, investasi teknologi, dan hilirisasi, namun terhambat regulasi mineral fluktuatif, biaya logistik 1,8× lebih mahal dari Malaysia, serta kehilangan 1,2 juta lapangan kerja formal ke Vietnam/Thailand. Globalisasi membuka pasar jasa (FDI 42% ke data center & health-tech), melahirkan 4 juta pekerja mikro (ojol, kurir, creator) dengan rata-rata Rp3,5 juta/bulan 35% di bawah UMP Jakarta namun 30% di antaranya perempuan kepala keluarga desa yang kini mandiri. Platform Gojek-Shopee sumbang 5% konsumsi rumah tangga via 10,9 miliar transaksi (2024), sekaligus memunculkan risiko pengangguran struktural, kebocoran data, dan defisit neraca jasa. Penelitian deskriptif-kualitatif ini menganalisis data BPS, World Bank, dan ADB untuk merumuskan lima pilar strategis 2030: (1) broadband-5G merata, (2) 1 juta talenta STEM via Digital Talent Scholarship, (3) ekosistem aman berbasis blockchain & Sovereign Cloud, (4) pusat inovasi AI-semikonduktor, serta (5) regulasi adaptif (Omnibus Law, UU PDP, SPBE Nasional). Sinergi penta-helix ini diharapkan menjadikan Indonesia bukan sekadar "koloni digital", melainkan motor pertumbuhan inklusif yang menciptakan 15 juta lapangan kerja berkualitas tinggi serta tambah 2,5% PDB tahunan hingga 2030.

Kata kunci : Transformasi Struktural, Ekonomi Digital, Pekerja Mikro, Kedaulatan Data, Inklusi 2030

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi adalah proses peralihan mendasar dalam komposisi perekonomian nasional, ditandai dengan berkurangnya peran sektor primer (pertanian) dan meningkatnya dominasi sektor sekunder (industri pengolahan) serta sektor tersier (jasa modern) (Nanga & Widjaja, 2024). Di Indonesia, agenda ini menjadi prioritas utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus pertumbuhan yang merata. Dampaknya tidak terbatas pada perges di PDB di mana andil pertanian terus menyusut 45% (1970) menjadi 13% (2024), melainkan juga mengubah pola penyerapan tenaga kerja (dari 29,7% di sektor primer pada 2020 menjadi 49,2 di sektor tersier) serta redistribusi pendapatan antarwilayah dan antargenerasi.

Sejak era reformasi ekonomi, Indonesia telah mengalami perubahan struktur ekonomi secara bertahap yang ditandai dengan menurunnya pangsa sektor primer dan meningkatnya sektor industri serta jasa (Wahyudi, 2023). Namun, laju transformasi struktural ini masih menghadapi tantangan terutama dalam penyesuaian penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi antar wilayah. Dari sisi investasi, FDI ke sektor tersier meleset 42% di antaranya mengalir ke data center, logistik digital, dan health tech. Sebaliknya FDI ke sektor sekunder hanya naik 87%, tercekik regulasi mineral yang fluktuatif dan biaya logistik antarpulau 1,8x lipat lebih mahal di bandingkan Malaysia. Akibatnya, 74% MNC manufaktur memilih Vietnam atau Thailand sebagai hubungan regional, sehingga Indonesia kehilangan 1,2 juta lapangan kerja formal bergaji tinggi setiap tahun (Wihardja et al., 2024).

Pada level rumah tangga, transformasi digital telah memunculkan sekitar 4 juta pekerja mikro baru seperti driver ojek online, kurir paket, dan content creator yang meraup Rp 3,5 juta per bulan (34,5% di antaranya hanya Rp 1-2 juta). Nilai ini 35% lebih rendah dari UMP Jakarta 2025, meski 30% dari mereka adalah perempuan kepala keluarga asal desa yang kini punya akses penghasilan mandiri. Platform seperti Gojek dan Shopee mencatat 10,9 miliar transaksi bruto pada 2024, menyumbang hingga 5% dari total konsumsi rumah tangga nasional melalui pengeluaran harian. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa transformasi ekonomi tak lagi sekedar “perpindahan sektor”, melainkan pembentukan starta ekonomi baru yang adaptif dan inklusif bagi kelompok rentan, tetapi rawan tanpa perlindungan sosial yang kuat (Bachtiar et al., n.d.). Oleh karena itu, analisis deskriptif tentang perubahan pola pertumbuhan ekonomi sangat penting sebagai dasar kebijakan pengembangan ekonomi yang lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif dinamika transformasi ekonomi Indonesia dengan menyoroti sektor ekonomi dan pola pertumbuhan dari tahun ke tahun. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan dan hambatan yang dialami Indonesia dalam proses transformasi struktrualnya menuju ekonomi yang lebih modern dan berdaya saing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis kualitatif yang didasarkan pada tinjauan kritis terhadap teori-teori transformasi ekonomi dan studi kasus empiris perkembangan Indonesia. Data primer berasal dari analisis konseptual perubahan

struktur ekonomi yang di identifikasikan dari literatur dan laporan resmi (BPS, World Bank, ADB). Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji transformasi struktural (Pertanian & Ekonomi, 2023) serta pola pertumbuhan inklusif (Oyvat, 2015), untuk selanjutnya membangun kerangka analitis mengenai penyebab perubahan struktur, dampak terhadap pola pertumbuhan dan langkah-langkah strategis untuk transformasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia

Perubahan struktur ekonomi Indonesia dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa) terutama dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat sejak era Orde Baru melalui pelaksanaan Repelita. Pertumbuhan ini menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat sesuai dengan Hukum Engels, di mana kenaikan pendapatan per kapita mengurangi porsi pengeluaran untuk makanan dasar dan meningkatkan permintaan terhadap barang manufaktur serta jasa. Akibatnya, terjadi pergeseran alokasi sumber daya menuju sektor-sektor modern tersebut untuk mendukung pola konsumsi dan pembangunan yang berkembang (Rinaldi et al., 2022).

Faktor demografi seperti ledakan penduduk dan urbanisasi berperan penting dalam mendorong perubahan struktur ekonomi. Kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian tradisional memacu perpindahan pekerja ke sektor industri dan jasa. Model Lewis dan Fei-Ranis menjelaskan bahwa pertumbuhan populasi menyebabkan tekanan pengangguran tersembunyi, mendorong mobilitas antar sektor demi mencapai keseimbangan ekonomi yang lebih baik (Fatmawati et al., 2018)

Perkembangan teknologi dan peningkatan modal melalui investasi baik domestik maupun asing turut mempercepat proses transformasi ekonomi Indonesia, dengan produktivitas tenaga kerja di sektor non-primer yang meningkat dan penurunan daya saing sektor primer karena keterbatasan lahan dan sumber daya alam. Analisis shift-share menunjukkan kontribusi signifikan sektor industri dan jasa terhadap PDB sepanjang 2000-2020, yang didorong oleh inovasi digital dan hilirisasi industri. Kebijakan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, desentralisasi fiskal, dan respons terhadap krisis seperti krisis 1998 dan pandemi COVID-19, menjadi faktor kunci yang memperkuat perubahan struktural. Selain itu, faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global dan integrasi perdagangan dunia menuntut diversifikasi ekonomi meski juga menimbulkan tantangan dalam penyerapan tenaga kerja.

Transformasi struktural ekonomi Indonesia selama 2000-2020 menunjukkan peningkatan kontribusi sektor industri dan jasa yang signifikan terhadap PDB, didukung oleh investasi yang meningkat serta kemajuan teknologi dan infrastruktur. Perubahan ini mencerminkan pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Namun, tantangan ketidakseimbangan dalam penyerapan tenaga kerja antar sektor tetap perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat agar transformasi dapat berlangsung lebih merata dan inklusif.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur yang masif dan kebijakan desentralisasi fiskal memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sektor industri dan jasa, sehingga meningkatkan efisiensi dan kapasitas ekonomi nasional. Respons pemerintah terhadap krisis eksternal juga menunjukkan adaptasi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Transformasi ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar global, menuntut diversifikasi produk dan layanan agar ekonomi Indonesia lebih resilient di tengah tekanan eksternal.

Dampak Globalisasi Pada Sektor Jasa

Dampak globalisasi pada sektor jasa di Indonesia membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial. Pertama, globalisasi telah memperluas pasar jasa Indonesia, memungkinkan perusahaan lokal bersaing di tingkat internasional dan menarik investasi asing langsung (FDI) yang besar ke sektor jasa. Hal ini meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan akses teknologi informasi dan komunikasi juga mempermudah integrasi sektor jasa Indonesia ke pasar global, terutama dalam subsektor pariwisata, logistik, dan teknologi digital (Studi et al., 2022).

Kedua, kemajuan teknologi yang didorong oleh globalisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan jasa. Digitalisasi layanan keuangan (fintech), telemedicine, dan platform perdagangan online memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas, mempercepat inklusi keuangan dan memperluas jangkauan pasar UKM. Inovasi ini memungkinkan pengurangan biaya transaksi dan mempercepat proses bisnis, sekaligus membuka peluang bagi peningkatan kualitas layanan dan diversifikasi produk jasa yang ditawarkan.

Namun, dampak negatif juga muncul akibat dominasi perusahaan multinasional dan platform digital global. Perusahaan asing seringkali lebih berdaya saing dan menguasai pangsa pasar yang besar, sehingga menekan pelaku jasa lokal dan menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan. Misalnya, pengaruh platform ride-hailing yang mengurangi pendapatan mitra pengemudi atau agen perjalanan konvensional yang hilang pekerjaan karena platform online. Hal ini menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi seperti pengangguran struktural dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Selanjutnya, globalisasi juga membawa risiko keamanan data dan privasi yang tinggi di sektor jasa digital. Kebocoran data besar-besaran akibat serangan siber semakin sering terjadi, memunculkan kebutuhan mendesak akan regulasi perlindungan data pribadi dan infrastruktur data nasional yang aman. Pemerintah Indonesia merespon dengan kebijakan seperti pembentukan UU Perlindungan Data Pribadi dan proyek Sovereign Cloud untuk menjaga kedaulatan data digital nasional dan mengurangi ketergantungan pada penyedia layanan asing.

Dampak ekonomi makro dari globalisasi di sektor jasa juga mencakup tantangan dalam neraca pembayaran dan ketergantungan terhadap pasar global. Ketika impor jasa meningkat tajam dan keuntungan dialirkan ke luar negeri, hal ini dapat memperburuk neraca pembayaran dan menyebabkan pelemahan nilai tukar. Oleh karena itu,

diversifikasi sektor jasa dan peningkatan daya saing lokal menjadi prioritas strategis untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap pasar global.

Akhirnya, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan dampak negatif globalisasi di sektor jasa. Langkah-langkah seperti Omnibus Law, kuota tenaga kerja lokal di perusahaan asing, serta investasi dalam pembangunan infrastruktur digital diharapkan dapat memperkuat sektor jasa nasional. Sinergi antara inovasi dan perlindungan ini penting agar sektor jasa Indonesia tidak menjadi “koloni digital” tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Langkah – langkah Strategis Transformasi

Langkah-langkah strategis transformasi digital di Indonesia mengacu pada beberapa pilar utama yang menjadi dasar pengembangan dan percepatan transformasi digital nasional hingga tahun 2030. Pertama, penguatan infrastruktur konektivitas yang merata dan andal menjadi prioritas utama untuk menjamin pemerataan akses digital di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini termasuk pengembangan jaringan broadband yang luas dan penetrasi teknologi 5G agar dapat mendukung kebutuhan digital masyarakat dan bisnis secara optimal. Kedua, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang digital sangat penting. Pemerintah menekankan peningkatan literasi digital dan pendidikan STEM yang inklusif, sehingga mampu membangun talenta digital yang siap bersaing di era ekonomi digital. Pelatihan dan pengembangan keterampilan digital harus diberi perhatian agar transformasi digital tidak meninggalkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Ketiga, menciptakan ekosistem bisnis digital yang kondusif dan aman membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, serta pelaku usaha. Penguatan aspek keamanan siber menjadi fokus utama, termasuk pengembangan konsorsium keamanan siber nasional berbasis teknologi blockchain untuk melindungi data penting dan menjaga kepercayaan pengguna layanan digital. Keempat, peningkatan riset dan inovasi mendorong pengembangan produk dan layanan digital yang inovatif serta berkelanjutan. Pemerintah mendukung peta jalan pengembangan kecerdasan buatan dan ekosistem semikonduktor untuk memacu daya saing industri nasional. Inisiatif ini juga mengarah pada pembangunan pusat data nasional (data center) yang menjadi tulang punggung layanan digital yang aman dan andal. Kelima, kebijakan dan regulasi yang adaptif dan responsif sangat dibutuhkan untuk mempercepat transformasi digital sekaligus melindungi kepentingan nasional, termasuk keberlangsungan bisnis dan perlindungan konsumen. Langkah seperti omnibus law, kuota tenaga kerja lokal, dan pengaturan terkait kedaulatan data digital menjadi kunci untuk memastikan transformasi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Menurut (Multidisiplin & Volume, 2025), langkah-langkah strategis transformasi digital difokuskan pada sinergi antara teknologi, sumber daya manusia, sistem informasi, dan kebijakan untuk mencapai layanan publik yang inklusif dan efisien. Langkah pertama adalah penguatan infrastruktur digital, termasuk penyediaan akses internet merata hingga ke daerah terpencil guna mengatasi kesenjangan digital, sebagaimana dijelaskan pada halaman 2 dan 8 yang menyoroti fragmentasi sistem akibat infrastruktur TIK yang belum

merata. Kedua, peningkatan literasi dan kompetensi ASN melalui program pelatihan seperti Digital Talent Scholarship, dengan penekanan pada mindset digital-first untuk mengurangi resistensi terhadap teknologi. Ketiga, pembangunan interoperabilitas sistem melalui Arsitektur SPBE Nasional dan GTP, yang memungkinkan integrasi data lintas instansi guna menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi. Keempat, penguatan tata kelola dan kebijakan, seperti implementasi Perpres No. 95/2018 dan UU PDP No. 27/2022, beserta roadmap daerah untuk memastikan adaptasi regulasi di tingkat lokal. Kelima, kolaborasi multisektor (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat) untuk co-create inovasi, seperti kemitraan dalam pengembangan API terbuka, guna mencapai transformasi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Transformasi ekonomi Indonesia berhasil menggeser pusat gravitasi dari sawah ke server: kontribusi pertanian runtuh dari 45% (1970) menjadi 13% PDB (2024), sementara sektor jasa meloncat hingga menyerap nyaris separuh tenaga kerja nasional. Globalisasi dan gelombang digital melahirkan 4 juta pekerja mikro yang menggerakkan 10,9 miliar transaksi Gojek-Shopee setahun, namun mayoritas hanya mengantongi 65% UMP sekaligus memberdayakan 1,2 juta perempuan kepala keluarga desa. Di sisi lain, regulasi mineral yang goyah dan logistik antarpulau 1,8× lebih mahal membuat 74% MNC manufaktur kabur ke Vietnam, merampas 1,2 juta lapangan kerja bergaji tinggi tiap tahun.

Agar lompatan ini tidak sekadar “perpindahan sektor” melainkan “penciptaan masa depan”, Indonesia harus mengeksekusi lima akselerator 2030 secara serentak:

1. Jaringan 5G sampai ke 2.700 desa terpencil dalam 36 bulan.
2. Latih 1 juta talenta STEM baru via Digital Talent Scholarship 2.0.
3. Bangun Sovereign Cloud + blockchain nasional agar data 280 juta warga tak lagi “numpang” di Singapura.
4. Luncurkan 12 pusat AI-semikonduktor di Batam, Cirebon, dan Balikpapan.
5. Revisi 41 regulasi sektoral dalam satu Omnibus Law Baru sebelum 2027.

Jika kelima roket ini menyala bersamaan, Indonesia bukan lagi penonton ekonomi digital, melainkan pelaku utama yang menambah 2,5% PDB ekstra per tahun, ciptakan 15 juta lapangan kerja layak, dan pastikan transformasi struktural 1970-2045 tidak hanya cepat—tetapi juga adil, hijau, dan tak tertinggal seorang pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, P. P., Berlianto, J., & Amelia, L. (n.d.). *ACCELERATING INCLUSIVE AND FAIR DIGITAL TRANSFORMATION TO ANTICIPATE CHALLENGES FACING THE FUTURE OF WORK. 1*.
- Fatmawati, A., Iskandar, D. D., & Semarang, K. (2018). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. 1*(3).
- Multidisiplin, J., & Volume, S. (2025). *3 1*,2,3. 9*(2).
- Nanga, M., & Widjaja, W. (2024). *Structural Transformation in the Indonesian Economy : Why does ' Financial Development ' Matter ? 19*(2), 213–222.
- Oyvatt, C. (2015). *Structural Change and the Kuznets Hypothesis*.
- Pertanian, D. E., & Ekonomi, F. (2023). *Analisis Empiris Atas Teori Dualistik Ekonomi Lewis : Studi Kasus Indonesia Empirical Analysis of the Lewis Economic Dualistic Theory : The*

- Case of Indonesia. 12(1), 1–22.*
- Rinaldi, N., Erfit, E., & Rosmeli, R. (2022). *Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia. 117–126.*
- Studi, P., Negara, A., & Putra, U. W. (2022). *DAMPAK GLOBALISASI DI NEGARA INDONESIA Fadhilah Dwi Widiyanti. 2, 73–95.*
- Wahyudi, S. T. (2023). *Structural Transformation Patterns and Factors That Influenced : The Case in Indonesia Pola Transformasi Struktural dan Faktor yang Mempengaruhinya : Kasus di Indonesia. 19(1), 112–126.*
- Wihardja, M. M., Bank, W., & Bank, W. (2024). *The Heterogeneous Impacts of Digital Transformation and Investment on Indonesia 's Labour Market. 524.*